

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP adalah media akuntabilitas kinerja yang dapat dipakai oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dan sebagai bahan pelaporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Media akuntabilitas yang dibuat secara periodik memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberi amanah atau pihak yang memberikan delegasi wewenang. Melalui media secara formal dapat dilakukan pertanggungjawaban dan bahan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menentukan fokus perbaikan kinerja yang berkesinambungan.

LAKIP yang selama ini disusun dan disajikan secara terpisah dengan laporan keuangan, harus disusun dan disajikan secara terintegrasi dengan laporan keuangan, sehingga dapat memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja. Dalam rangka perwujudan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, pemerintah secara periodik wajib

mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang dituangkan dalam LAKIP.

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya mengacu pada instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan pemerintah nomor 108 tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Maka visi, misi dan tujuan organisasi atau Instansi Pemerintah dipertanggungjawabkan secara transparan dan dinilai berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis (Renstra). Selanjutnya, melalui peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diterbitkan sebagai penyempurna dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyajikan laporan tersebut sebagai alat pengukur tingkat kesuksesan kinerja. Laporan ini disajikan atas berbagai laporan yang sama dari setiap instansi/SKPD melalui hasil evaluasi dan rangkuman berbagai kinerja yang dihasilkan, sehingga tujuan dan amanat laporan tersebut dapat tersampaikan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi amanat. Dengan demikian, LAKIP merupakan sarana bagi instansi

pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Menurut Santoso (2013) penyusunan LAKIP kepada pihak yang berhak (secara hierarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:

- a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan.
- b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah perbaikan, dalam mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksana tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi.
- c. Perbaikan dalam perencanaan khususnya jangka menengah dan jangka pendek.

Santoso (2013) juga mengemukakan LAKIP yang disampaikan oleh instansi pemerintah antara lain bermanfaat untuk :

- a. Meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas instansi dimata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- b. Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai

dari perencanaan hingga evaluasi kinerja serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan instansi tersebut.

- c. Dapat mengetahui, mengevaluasi dan menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.
- d. Mendorong instansi pemerintahan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- e. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja instansi pemerintah pada periode tertentu. Capaian kinerja (*performance result*) pada suatu periode diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) pada periode yang sama maka hasilnya dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan/ kegagalan pada periode tersebut. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya telah merumuskan sasaran yang ingin dicapai secara bertahap sampai akhir 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas aparatur
- b. Berkembangnya seni dan kebudayaan daerah
- c. Meningkatnya sosialisasi dan promosi kekayaan budaya daerah
- d. Terciptanya masyarakat yang mempunyai partisipasi yang tinggi untuk mengembangkan dan melestarikan budaya daerah
- e. Terbangunnya kemitraan pengelolaan kekayaan budaya antar daerah
- f. Terbangunnya fasilitas kebudayaan daerah
- g. Berkembangnya pemasaran pariwisata
- h. Berkembangnya destinasi pariwisata
- i. Berkembangnya/terbangunnya kemitraan
- j. Meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan
- k. Meningkatnya keterlibatan pemuda dalam kegiatan kepemudaan
- l. Meningkatnya jiwa kepemimpinan dan kepeloporan dikalangan pemuda
- m. Terjaringnya bakat dan potensi pelajar di cabang olahraga tertentu
- n. Terdatanya olahraga unggulan di 9 kecamatan
- o. Terjadinya kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pemberian penghargaan kepada atlet
- p. Terbinanya atlet pemula hasil identifikasi bakat dan potensi pelajar
- q. Terbinanya olahraga unggulan di kecamatan maupun kabupaten
- r. Terbinanya atlet berprestasi hasil kompetisi tingkat kabupaten maupun provinsi baik pelajar maupun kejurda

Dari kedelapan belas sasaran tersebut telah dirumuskan sasaran strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya, yaitu:

- a. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
- b. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya
- c. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
- d. Presentase sanggar seni yang aktif
- e. Presentase situs budaya yang terpelihara
- f. Jumlah kunjungan wisatawan (domestik)
- g. Jumlah kunjungan wisatawan (asing)
- h. Presentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
- i. Presentase tingkat hunian hotel
- j. Rasio destinasi wisata unggulan
- k. Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) per 1.000 penduduk
- l. Jumlah lapangan olahraga per 1.000 penduduk
- m. Jumlah kegiatan pembinaan pemuda
- n. Jumlah *event* olahraga tingkat kabupaten yang diselenggarakan
- o. Jumlah *event* olahraga tingkat regional yang diikuti
- p. Jumlah *event* olahraga tingkat nasional yang diikuti di kabupaten
- q. Pembinaan olahraga kepada pengda keolahragaan di kabupaten
- r. Jumlah kelompok kewirausahaan pemuda
- s. Jumlah siswa berprestasi di bidang olahraga

- t. Presentase guru olahraga latar belakang olahraga
- u. Presentase olahraga rekreasi yang dikembangkan
- v. Presentase olahraga prestasi yang berprestasi

Sebagai aktualisasi dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, maka dalam kurun waktu 5 tahun (2009-2014), sedang dan akan dilaksanakan 9 program utama, lebih lanjut dalam pelaksanaan 9 program utama tersebut, dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dialokasikan dalam periode tahun 2009-2014.

Anggaran yang di dapat oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya yaitu:

Tabel 1.1

Pendapatan Dinas BUDPARPORA Kabupaten Kubu Raya

Tahun	Pendapatan
2011	Rp 5.714.240.996,00
2012	Rp 6.143.562.447,00
2013	Rp 6.310.961.650,00

Sumber: Dinas BUDPARPORA Kabupaten Kubu Raya

Sumber dana Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Kubu Raya adalah bersumber dari APBD Kab. Kubu Raya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang meneliti tentang Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi

Utara seperti yang dilakukan oleh Santoso (2013) meneliti tentang tingkat keberhasilan/kegagalan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dengan menganalisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada 1 tahun anggaran (1 periode). Hasilnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Utara mengalami keberhasilan dalam menjalankan program dan kegiatannya.

Berdasarkan penjelasan diatas menarik dilakukan penelitian terhadap **“Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya”**. Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Susanto (2013) karena tahun anggaran yang diteliti bukan 1 tahun melainkan 3 tahun, agar dapat diketahui tingkat keberhasilan/kegagalan yang di capai setiap tahunnya dan dapat diperbandingkan dan diidentifikasi bagi perbaikan di masa mendatang.

1.2 Rumusan Permasalahan

Dari latar belakang yang peneliti uraikan di atas, masalah yang diungkapkan oleh peneliti adalah “Bagaimana Tingkat Keberhasilan atau Kegagalan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat tingkat keberhasilan/kegagalan yang dialami oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Kubu Raya selama 3 tahun (2011-2013).

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan oleh peneliti adalah:

1. Bagi Akademisi:

Sebagai penerapan dari mata kuliah yang pernah dipelajari sebelumnya yaitu mata kuliah akuntansi keprilakuan dan akuntansi sektor publik serta untuk lebih memperluas wawasan dan pengetahuan penulis.

2. Bagi instansi Pemerintah:

- a. Dapat dijadikan alternatif pemerintah dalam menilai akuntabilitas kinerja pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya.
- b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

3. Bagi pihak lain:

Sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dan akan menjadi input guna menambah wawasan dan pengetahuan untuk acuan penelitian sejenis berikutnya.

Universitas Tanjungpura